

KOMUNIKASI POLITIK MEGAWATI SOEKARNOPUTRI TERHADAP KEPEMIMPINAN JOKOWI DALAM PEMBERITAAN METRO TV

Usep Saeful Kamal¹, Sadri²

^{1,2}Program Studi Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina
Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 Indonesia
E-mail: usef.iful@gmail.com

Abstract: Political communication is communication directed at achieving an influence in such a way that the problems discussed by this type of communication activity can bind all its citizens through sanctions jointly determined by political institutions. So that in political communication a political communication channel is needed which is a means or tool to facilitate the exchange of information or messages. The delivery of communication from communicators to communicants can be in the form of images, writing or actions. Meanwhile, television is a tool and structure that conducts political communication in the context of mass media as a means of making it easier to convey political messages. Metro TV's coverage as a public channel was allegedly utilized by Megawati Soekarnoputri in overseeing Jokowi's leadership from serving as Mayor of Solo to the second term President, 2019-2024. The purpose of this research is to obtain in-depth information and answers related to the impact of Megawati Soekarnoputri's political communication on Jokowi's leadership in Metro TV coverage.

Keywords : Political Communication, Megawati Soekarnopurti, Jokowi's Leadership, Metro TV

Abstrak: Komunikasi politik ialah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga pada masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Sehingga dalam komunikasi politik dibutuhkan saluran komunikasi politik yang merupakan sarana atau alat untuk mempermudah pertukaran informasi atau pesan. Penyampaian komunikasi dari komunikator kepada komunikan bisa dalam bentuk gambar, tulisan ataupun tindakan. Sementara, televisi merupakan alat dan struktur yang melakukan komunikasi politik dalam konteks media masa sebagai sarana mempermudah menyampaikan pesan politik. Pemberitaan Metro TV sebagai saluran publik disinyalir dimanfaatkan Megawati Soekarnoputri dalam mengawal kepemimpinan Jokowi mulai dari menjabat Walikota Solo hingga Presiden periode kedua, masa jabatan 2019-2024. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan informasi dan jawaban secara mendalam terkait dampak komunikasi politik Megawati Soekarnoputri terhadap kepemimpinan Jokowi dalam pemberitaan Metro TV.

Kata kunci: Komunikasi Politik, Megawati Soekarnopurti, Kepemimpinan Jokowi, Metro TV

Pendahuluan

Peran Megawati Soekarnoputeri dalam perjalanan karir politik dan kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa dielakkan. Paling tidak dimulai sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Walikota Solo pada tahun 2005, memakai “kendaraan” PDIP dalam Pilkada saat itu hingga ia menang dan dilantik menjadi Walikota Solo. Bahkan

dengan gaya politik “blusukan”, Jokowi berhasil terpilih kembali untuk periode kedua pada Pilkada Solo tahun 2010. Kemudian saat menjabat Walikota periode kedua, program mobil ESEMKA yang dipublikasi secara masif oleh media membuatnya menjadi bahan berbincangan orang seantero negeri. Wajar bila kemudian Jokowi yang merupakan pemimpin daerah, perlahan berubah menjadi tokoh nasional.

Sebagai Walikota Solo dua periode yang memiliki indeks kinerja yang baik, lalu pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 Jokowi sebagai kader PDIP “dihadirkan” Megawati Soekarnoputri untuk turut berkontestasi. Bukan tanpa alasan, Megawati Soekarnoputri memboyong Jokowi ke Jakarta disebabkan karena keberhasilannya mengelola Kota Solo dengan pendekatan yang lebih humanis melalui “busukan”. Meskipun ditengah jalan elit PDIP kurang merestui Jokowi, tetapi akhirnya pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diusung PDIP dan Gerindra. Akhirnya Jokowi-Ahok menang.

Menurut Abdul Hamid dalam Ali Noer Zaman¹ mengidentifikasi empat faktor populisme yang memungkinkan Jokowi merebut kursi gubernur DKI, yakni: kehadiran Jokowi sebagai terobosan social dan kemampuan pemerintahan yang menurun, tradisi politik yang korup dan kering serta citra buruk dari partai politik, adanya perubahan sosial, dan munculnya bentuk-bentuk perwakilan politik di luar institusi politik tradisional.

PDIP merupakan salah satu partai besar di Indonesia dan sangat bergantung pada sosok Megawati Soekarnoputri. Megawati memegang pengaruh penuh dalam berjalannya partai ini sehingga PDIP. Selain selalu dipilih kembali sebagai ketua umum dalam kongres partai, ia juga sebagai pigur kunci dalam menentukan Capres yang akan diusung PDIP. Menjelang Pilpres 2014, PDIP yang diprediksi akan mengusung Megawati lagi sebagai capres nyatanya mesti merubah haluan untuk mengikuti suara *grass-root* yang

menghendaki Joko Widodo (saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta). Popularitas Joko Widodo (Jokowi) yang sangat tinggi berdasarkan survei-survei, akhirnya membuat PDIP mau mengusungnya. Bahkan, Megawati telah menegaskan dalam Kongres PDIP terakhir di tahun 2015 bahwa Jokowi adalah petugas partai sehingga harus mengikuti kehendak partai.²

Menurut Aditya Perdana dan Ahmad Alhamid,³ seiring berjalannya waktu dan semakin mencuatnya perdebatan akan siapa yang harusnya PDIP usung di Pilpres, Megawati akhirnya mengeluarkan mandat melalui kertas berkop surat PDIP yang langsung dituliskannya sendiri dengan tangan pada hari Jum’at, 14 Maret 2014. Dari tulisan tangannya tersebut, Megawati Soekarnoputri menyatakan PDIP mengusung Joko Widodo sebagai kandidat yang akan diusung partainya dalam Pilpres 2014.

Terkait definisi komunikasi politik, Astris S. Soesanto⁴ mengungkapkan

² Aditya dan Ahmad Alhamid Perdana, “Presidentialized Party Di Indonesia: Kasus Perilaku PDI-P Dalam Pencalonan Joko Widodo Pada Pilpres 2014,” *Jurnal Politik* 3 (2018).

³Aditya dan Ahmad Alhamid Perdana, “Presidentialized Party Di Indonesia...,” (2008).

⁴Thomas Tokan Pureklolon. *Komunikasi Politik, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus & Negarawan*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, (2016: p4).Dr. Thomas Tokan Pureklolon, <i>KOMUNIKASI POLITIK, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus & Negarawan</i> (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).Dr. Thomas Tokan Pureklolon, <i>KOMUNIKASI POLITIK, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus & Negarawan</i> (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).Dr. Thomas Tokan Pureklolon, <i>KOMUNIKASI POLITIK, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus & Negarawan</i> (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).Dr. Thomas Tokan Pureklolon, <i>KOMUNIKASI POLITIK, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus & Negarawan</i> (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).

¹ Ali Noer Zaman, “Kehadiran Jokowi Di Pentas Politik Nasional,” *Kajian Ilmu Sosial* 1 Nomor 1 (2020).

bahwa komunikasi politik ialah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga pada masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Sehingga dalam komunikasi politik dibutuhkan saluran komunikasi politik yang merupakan sarana atau alat untuk mempermudah pertukaran informasi atau pesan. Penyampaian komunikasi dari komunikator kepada komunikan bisa dalam bentuk gambar, tulisan ataupun tindakan.⁵

Menurut Zaenal Mukarom,⁶ menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan hubungan timbal balik antara politisi dengan konstituen atau seluruh warga yang bertempat tinggal di wilayah politiknya. Pesan politik disampaikan demi menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi politiknya. Diskusi atau pembicaraan antara politisi dengan konstituen umumnya membahas permasalahan politik, termasuk pesan politik.

Pada kenyataannya, isi pesan politik lebih banyak menggunakan komunikasi publik (kampanye atau orasi). Isi pesan politik juga berkaitan dengan *agenda setting* media pesan kelompok atau

golongan tertentu. Dalam hal ini, propaganda juga dapat bermain di dalamnya untuk membentuk persepsi baru di mata publik, sehingga dapat memengaruhi proses keuksesan sebuah partai politik dalam bersaing berebut suara menuju jalan kekuasaan.⁷

Miriam Budiarto berpendapat: Struktur yang melakukan komunikasi politik dapat dibedakan ke dalam lima macam. Pertama, komunikasi tatap muka yang bersifat informal, yang merupakan bentuk utama komunikasi. Kedua, struktur sosial nonpolitis, seperti keluarga, kelompok ekonomi atau keagamaan. Ketiga, struktur input politik, seperti partai politik, organisasi kepentingan, atau masyarakat sipil. Keempat, struktur output politik, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan birokrasi. Kelima, media massa, seperti misalnya, surat kabar harian mingguan, radio dan televisi.⁸

Terkait pigur Jokowi sendiri, A. Zulkarnain dan Syamsuddin Haris⁹ menyatakan bahwa model kepemimpinan politik Joko Widodo yang suka blusukan juga menuai beberapa kritik. Sebagian pihak menganggap blusukan tersebut hanya strategi pencitraan agar dianggap dekat dengan rakyat. Menurut Igo Ilham waktu dan energi Joko Widodo bisa habis hanya untuk blusukan.¹⁰ Oleh sebab itu, ia menyarankan agar Joko Widodo

Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus & Negarawan</i> (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016). Dr. Thomas Tokan Pureklolon, <i>KOMUNIKASI POLITIK, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus & Negarawan</i> (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016). Dr. Thomas Tokan Pureklolon, <i>KOMUNIKASI POLITIK, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus & Negarawan</i> (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).

⁵Aditya dan Ahmad Alhamid Perdana, "Presidentialized Party Di Indonesia...", (2008).

⁶ Zaenal Mukarom, "Komunikasi_Politik" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016).

⁷Zaenal Mukarom, "Komunikasi_Politik...", (2016).

⁸ Khoiruddin Muchtar, "Komunikasi Politik Dan Pembentukan Citra Partai," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2016): 136-147.

⁹ A. Zulkarnain dan Syamsuddin Harris, "Fenomena Blusukan Dalam Model Kepemimpinan Politik Joko Widodo," *Politik dan Kajian Pembangunan* 13 (2017): Kajian Politik.

¹⁰A. Zulkarnain dan Syamsuddin Harris, "Fenomena Blusukan Dalam Model Kepemimpinan Politik Joko Widodo...", (2017).

menularkan kebiasaan itu kepada pejabat wilayah. “Seharusnya itu dilakukan oleh pion-pion pemda, yaitu lurah, camat, dan suku dinas”. Terkait kritik tersebut, pada beberapa kesempatan, Joko Widodo menjelaskan bahwa turun ke lapangan bukan berarti hanya menemui warga serta melihat kondisi perkampungan kumuh, akan tetapi, juga untuk mengontrol lapangan, memantau pelaksanaan proyek dan program kerja.

Dalam konteks komunikasi politik, Jokowi menjalankan diplomasi “meja makan” sejak ia menjadi Walikota Solo periode pertama. Komunikasi politik meja makan ala Jokowi tidak hanya dilakukan menggalang simpati masyarakat pada saat menjadi Walikota Solo tetapi juga dilanjutkan ketika menjadi seorang presiden seperti menggelar jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Bogor di hadiri semua ketua umum partai koalisi, Salah satunya adalah Megawati Soekarnoputri (PDIP).¹¹

Selain itu, hubungan Jokowi dengan keluarga Soekarno terutama Megawati Soekarnoputri nampak erat dan dapat dilihat dari bentuk komitmen dasar dari Jokowi praktekkan Nawacita. Salah satu kebijakan penting Nawacita Jokowi adalah terkiat kemaritiman yang dulu dgagas pula oleh Soekarno. Kebijakan ini sangat kontras dengan anggaran dasar partai PDIP yang menjadi tempat tumbuh besarnya karir politik Jokowi selaku kader partai. Anggaran Dasar PDIP Dalam pasal 9 poin C dijelaskan fungsi partai sebagai wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman,

¹¹ Rusmawaty Bte. Rusdin, “Komunikasi Politik Jokowi Melalui Diplomasi Di Meja Makan,” *Kinesik* 7 (2020).

kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wajar bila muncul ungkapan Jokowi: ...

”Bapak adalah idolaku selain Bung Karno, presiden pertama Indonesia. Menurutku, keduanya sama-sama memiliki sifat kemandirian yang kuat”...

Kutipan inilah yang menjadi dasar kalau Jokowi merupakan pengagum berat dari bapak proklamator Indonesia tersebut, tentu ada pengaruh Megawati Soekarnoputri disitu.¹²

Bila dikaitkan dengan prinsip etika pemberitaan politik televisi, hendaknya Metro TV berpegang teguh terhadap etika Islam yang dengan gamblang mengatur bagaimana kebenaran itu diwartakan. Kejujuran dan kebenaran menjadi elan vital dalam semua pemberitaan Metro TV. Joko Tri Haryanto mengutip Jalaludin Rakhmat dalam kaitan komunikasi Islam yang menerapkan konsep kebenaran dan kejujuran, dimana kebenaran menjadi tanggung jawab paling dasar bagi praktek jurnalisme. Untuk memenuhi kewajiban paling elementer ini, Metro TV harus senantiasa berpegang teguh kepada koridor kejujuran dan keadilan. Berita Metro TV dituntut memiliki kehandalan dan kualitas tertentu sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempelajari dan berpikir tentang realitas yang melingkupi sehingga mereka dapat menentukan pendirian yang tepat dalam situasi tertentu.

¹² Faisal, “Peran Joko Widodo Dalam Implementasi Nilai-nilai Pemikiran Maritim Soekarno Melalui Visi Poros Maritim Dunia” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

Dalam tradisi keilmuan Islam yang khas, Nani Widiawati mengungkapkan bahwa proses serta komunikasi memiliki istilah sendiri, yaitu dakwah sebagai suatu proses yang berupaya mengubah suatu situasi kepada situasi yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Dakwah dimaknai sebagai proses mengajak umat manusia supaya mengikuti jalan yang diridloi Allah. Komunikasi dalam Islam merupakan bentuk komunikasi yang semua komponennya disinari oleh ajaran Islam, baik karakter yang ditunjukkan oleh komunikator dan komunikan, prosesnya, penggunaan medianya, serta tujuannya.

Teknologi televisi memudahkan pekerja media karena tidak perlu membawa peralatan kerja yang besar dan berat yang menghabiskan banyak waktu. Dengan *Satelit News Gathering* (SNG) portable yang memiliki ukuran bagasi, wartawan televisi dapat langsung mengirimkan salinan dan master edit ke pusat penyiaran dan mengirimkannya kembali ke rumah-rumah. Teknologi membuat semua kendala terpecahkan. Itu membuat audiens mampu menerima pesan media dengan segera. Itu menjadi referensi. Mereka mendiskusikannya dan memberikan tanggapan atas apa pun yang mereka pikirkan. Karenanya, globalisasi media berjalan dengan sempurna.

Ibrahim,¹³ menyatakan: “Kekuatan televisi didasarkan pada *massiveness*, *simultanitas*, dan daya tarik gambar dan jangkauan yang luas. Jika dibandingkan dengan media lain, televisi lebih mudah dikonsumsi/ditonton karena penonton hanya menyalakan dan memilih saluran, sehingga dapat ditayangkan langsung ke rumah-rumah dan masyarakat Indonesia.

¹³ Syaiful Halim, “Political Accountability and Television Media,” *Ideology* 3 (2018).

Mereka menontonnya dengan menyenangkan. Seperti yang dinyatakan McLuhan, media seperti perpanjangan indera, organ, dan saraf kita. Selain itu, dunia kita semakin sempit dan sempit. Kekuatan media massa telah berubah menjadi “agama” dan “dewa” sekuler. Artinya itu Tingkah laku manusia tidak berdasarkan agama tradisional tetapi secara tidak sadar kita telah berada di bawah tata kelola media massa seperti program televisi.¹⁴

Usaha media televisi dalam mengkonstruksi aktor politik termasuk seperti hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi maupun isu politik dalam dilihat dari berbagai macam aspek program baik berita maupun program ringan lainnya. Ada yang ingin disampaikan melalui masuknya aktor-aktor politik ke dalam tayangan hiburan, *reality show*, ataupun *talk show* ringan. Bisa saja hal itu adalah sebuah bentuk panggung politisi untuk mendapatkan tempat diingatan masyarakat karena tidak jarang acara demikian terletak pada jam-jam *prime time* atau memiliki rating yang cukup tinggi karena dinilai menghibur, bisa juga media memiliki pandangan politik serupa dengan aktor politik yang diundang, atau mungkin media memang sengaja mengundang aktor politik untuk menaikkan rating program acara yang sedang berlangsung.¹⁵

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki pendekatan yang lebih variatif jika dibandingkan dengan metode kuantitatif. Dimana

¹⁴ Syaiful Halim, “Political Accountability and Television Media...,” (2018).

¹⁵ Clarisa Aisyah Putri, “Politainment Media Di Indonesia,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya, 2018).

penelitian kualitatif memiliki tujuan memahami peristiwa yang terjadi dan apa yang dialami oleh subjek penelitian. Seperti perilaku, motivasi, perbuatan dan persepsi, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan juga bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah. Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang menanganinya untuk memperoleh gambaran mengenai kategorisasi tertentu.

Penelitian kualitatif dilaksanakan dengan menggunakan strategi dimana peneliti secara cermat terhadap suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu dan peneliti mengumpulkan berbagai prosedur data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian metode kualitatif dapat dijadikan acuan dalam menghasilkan data deskriptif tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati sebagai subjek. Dalam penelitian dengan metode kualitatif, peneliti ingin mendapatkan informasi dan jawaban secara mendalam atas sebuah kasus atau peristiwa yang tidak dapat dihitungkan dengan angka. Studi kasus dipilih karena peneliti ingin mengkaji secara komprehensif dan mengumpulkan informasi secara lengkap dan mendalam serta mengetahui permasalahan yang ada.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis tayangan berita Metro TV terhadap Megawati Soekarnoputri. Subjek dalam penelitian ini adalah Jokowi yang dikenal sangat dekat dengan Megawati Soekarnoputri di PDIP. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah komunikasi politik yang

biasanya digunakan oleh Megawati Soekarnoputri terhadap kepemimpinan Jokowi sebagai kader PDIP.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dalam model interaktif menurut Huberman dan Miles, yang dibagi menjadi tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan teknik pemeriksaan data, di mana teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data tersebut, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data.¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pemberitaan media TV dengan menggunakan analisis framing. Sebagaimana diketahui bahwa framing memiliki definisi sebagai konsep analisis yang menggambarkan realitas peristiwa, aktor, kelompok dan sebagainya, yang dibingkai oleh media. Analisis framing berupaya mengetahui realitas yang dikonstruksi oleh media. Konstruksi realitas oleh media menghasilkan bagaimana sebuah peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Perkembangan analisis framing yang beranjak dari pandangan konstruksionis menempatkan manusia dan masyarakat sebagai produk yang dialektis, dinamis dan plural secara terus menerus. Hal ini

¹⁶ Jofanny Budiman and H.H. Daniel Tamburion, "Komunikasi Politik Megawati Dalam Membangun Brand Image Partai," *Koneksi* 2, no. 2 (2019): 401.

kemudian melahirkan realitas yang tidak hanya dibentuk secara ilmiah maupun sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tetapi juga dapat dibentuk dan dikonstruksi sehingga setiap orang bisa memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas yang ada.¹⁷

Pembahasan

Media Metro TV

Media Televisi merupakan media yang bersifat audio-visual. Dua puluh tahun setelah penemuan radio, muncullah televisi. Media bisu dan media buta digabungkan, hasilnya adalah televisi. Serentak dengan itu, di dalam perkembangan teknologinya, televisi begitu menjadi dalam dan kuat merasuki kehidupan masyarakat.¹⁸

MetroTV adalah sebuah stasiun televisi swasta berita yang berkedudukan di Indonesia. MetroTV didirikan oleh PT Media Televisi Indonesia, resmi mengudara sejak 25 November 2000 di Jakarta. Pada awalnya didirikan sebagai perusahaan patungan dengan kepemilikan saat itu adalah Media Group dan Bimantara Citra dengan kepemilikan masing-masing 75% dan 25%.

Sejak Oktober 2003, Kepemilikan MetroTV telah 100 persen dimiliki oleh Media Group pimpinan Surya Paloh yang juga memiliki harian Media Indonesia dan Lampung Post. Stasiun TV ini memiliki konsep agak berbeda dengan stasiun televisi lain, sebab selain mengudara selama 24 jam setiap hari,

stasiun TV ini hanya memusatkan acaranya pada siaran warta berita saja. Tetapi dalam perkembangannya, stasiun ini kemudian juga memasukkan unsur hiburan dalam program-programnya, meski tetap dalam koridor news. MetroTV adalah stasiun pertama di Indonesia yang menyiarkan berita dalam bahasa Mandarin: Metro Xin Wen, dan juga satu-satunya stasiun TV di Indonesia yang tidak menayangkan sinetron.

Metro TV juga menayangkan siaran internasional berbahasa Inggris pertama di Indonesia Indonesia Now yang dapat disaksikan dari seluruh dunia. Stasiun ini dikenal memiliki pembawa acara berita terbanyak di Indonesia. MetroTV juga menayangkan program e-Lifestyle, yakni program talkshow yang membahas teknologi informasi dan telekomunikasi. Metro TV adalah salah satu media berita terbesar di Indonesia yang menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi yang bertanggungjawab dan banyak mengedukasi masyarakat. Berbagai program acaranya banyak menjadi trending dan menjadi favorit masyarakat, seperti Kick Andy, Mario Teguh, Mata Najwa, dan banyak lagi lainnya. Bahkan pemberitaan-pemberitaan di seluruh daerah maupun internasional dapat kita saksikan setiap hari selama 24 jam.

Pemberitaan Metro TV

Dalam rilis berita Solopos.com bertajuk MATA NAJWA METRO TV : Soal Jokowi Capres, Megawati: Bisa Enggak Kamu Jadi Pemimpin? yang dipublikasi 22 Januari 2014 menggambarkan betapa pengaruh Megawati Soekarnoputri terhadap proses pencalonan Jokowi sebagai Capres 2014 sangat kuat. Hal itu dikuatkan dengan kutipan ungkapan Megawati Soekarnoputri: "Saya ini kalau

¹⁷ Yeni Yulianti, "Analisis Framing Media Kompas Dalam Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017," *S2 Ilmu Politik Universitas Airlangga* (2017): 10.

¹⁸ Aliyah Lathifah, *Media Televisi Sebagai Sumber Berita (Studi Terhadap Program Breaking News Metro Tv)*, *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar*, Vol. 152, 2016.

sudah serius sangat serius. Apalagi ini menyangkut soal kepentingan bangsa dan negara. Itu juga salah satu pesan Bung Karno, 'kamu harus betul-betul berpikir secara mendalam kalau soal negara karena dampaknya luar biasa. Menjadi seorang presiden kata Megawati, tak melulu urusan survei. Survei Capres yang menempatkan Jokowi di urutan teratas, Mega berpesan tak lantas membuat Jokowi sombong. "Kamu jangan bangga dulu. Menjadi presiden yang diperlukan itu bukan survei tinggi atau rendah. Karena bukan itu yang diperlukan. Bisa enggak kamu jadi pemimpin?" kata Mega.¹⁹

Terkait keterpilihan pak Jokowi menjadi presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan mendapat restu langsung dari Megawati, Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai Megawati adalah orang yang pertama kali berbahagia karena berhasil mencetak kader dan memenuhi keinginan Soekarno. "Dia kan bilang, Bung Karno menginginkan Jokowi jadi pemimpin Indonesia. Dia juga bilang Jokowi adalah penerus Bung Karno, maka Megawati harus bahagia dan mendukung sikap Jokowi," tegasnya.

Pada Rakernas PDIP tahun 2016, Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih pada Pilpres 2014 terkait menghidupkan kembali GBHN. Berita bertajuk Menghidupkan Kembali GBHN adalah Ancaman Bagi Presiden yang disirakan langsung Metro TV secara langsung itu menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri senantiasa

berada didekat Jokowi. Dukungan ibu Mega yang dikutip dari Mtro News: "Sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki sebuah haluan pembangunan nasional jangka panjang. Rencana pembangunan berupa pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Bukan hanya soal ekonomi, tetapi di segala bidang kehidupan negara dan masyarakat."²⁰

Lalu, *Metrotvnews.com* menayangkan berita terkait permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara tegas meminta kepada presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo agar jumlah kader PDIP menempati menteri harus lebih banyak dari partai lain. "Di dalam Kongres PDIP Bapak Presiden, saya minta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak", ucap Megawati. Dalam ungkapan Megawati Soekarnoputri yang disiarkan pada 8 Agustus 2019 menyiratkan bahwa pengaruh ibu Mega terhadap Jokowi tidak pernah surut.²¹ Bahkan banyak pengamat menilai, posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDIP bakal memberi pengaruh sendiri bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau era kedua Jokowi.

Selanjutnya, kuasa Megawati terhadap Jokowi begitu powerful. Paling tidak tergambar dalam pemberitaan Metro TV yang dirilis Media Indonesia pada 25 Januari 2018 yang berjudul: Kader PDIP diminta amankan dan suskseskan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019. Seperti pernyataan Megawati Soekarnoputri: "Kami membuat satu rekomendasi untuk

¹⁹ Rini Yustiningsih, "MATA NAJWA METRO TV: Soal Jokowi Capres, Megawati: Bisa Enggak Kamu Jadi Pemimpin?," *Solopos.Com* (Solo: Solopos.com, 2014).

²⁰ Metro News, "Menghidupkan Kembali GBHN Adalah Ancaman Bagi Presiden," 2016.

²¹ *Metronewstv.com*, "Megawati: Menteri Dari PDIP Harus Lebih Banyak" (Indonesia: *Metrotvnews.com*, 2019).

eksternal dan internal, yaitu merekomendasikan kepada semua anggota dan kader PDI Perjuangan untuk mengamankan, menjaga, dan menyukseskan pencalonan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024," kata Megawati dalam penutupan Rakernas III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali. Megawati Soekarnoputri mengatakan rekomendasi tersebut harus dijalankan oleh seluruh anggota dan kader PDIP untuk menyukseskan keputusan partai yang mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.²²

Kemudian Jokowi menanggapi keputusan Rakernas III PDIP itu dengan konferensi pers serta membacakan ketetapan Rakernas III itu yang disiarkan langsung oleh Metro TV: "Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu Hj. Megawati Soekarnoputri yang dengan menggunakan hak prerogratifnya yang diberikan oleh Kongres Partai telah menetapkan kembali saya sebagai calon Presiden 2019-2024. Dalam konteks itu, Jokowi belum tentu menjadi Calon Presiden bila tidak didukung oleh Megawati Soekarnoputri yang melekat sebagai ketua umum PDIP secara institusional."²³

Pada kesempatan lain, Megawati kembali menunjukkan sikap yang mendukung penuh kepemimpinan Jokowi dalam menjaga kedaulatan negara dari gangguan negara lain. Dukungan ini disampaikan dalam pidatonya yang disampaikan pada perayaan HUT PDI-P yang ke-47 dan Rakernas I PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2020 di Jakarta dan disiarkan langsung oleh Metro TV. Megawati

mengungkapkan bahwa prinsip politik bebas aktif ini tentu dipegang teguh oleh Presiden Jokowi. Megawati mendukung penuh kepemimpinan Jokowi dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam sikap ketegasan presiden Jokowi terkait kasus batas wilayah negara di perairan Natuna. Megawati menganggap tidak ada lagi tawar menawar terkait kedaulatan negara.

Seperti disampaikan oleh Djarot Saiful Hidayat, bahwa setiap visi misi pak Jokowi selalu mendapat dukungan dari ibu Megawati dan dari kader PDI Perjuangan selama kepemimpinan pak Jokowi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Dari hasil analisis tersebut, dalam pemberitaan Metro TV menunjukkan bagaimana Megawati secara terang-terangan mendukung penuh kepemimpinan Jokowi dalam melaksanakan pemerintahan. Tapi disisi lain gaya komunikasi Megawati juga menunjukkan adanya sebuah upaya mempengaruhi presiden Jokowi dalam hal alokasi kader PDI Perjuangan untuk menempati posisi strategis kabinetnya. Sudah jelas bahwa kepemimpinan Jokowi tak bisa lepas dari pengaruh ketua umum PDI-P, ibu Megawati.

Dalam pidatonya saat Kongres V PDI Perjuangan, yang disiarkan oleh Metro TV dengan judul, "Megawati: Susah Ketemu Pak Jokowi, Padahal Saya Mpoknya". Secara terang Megawati mengatakan bahwa jabatan yang diberikan sebagai ketua BPIP adalah hasil dari usulan Megawati sendiri yang awalnya hanya diberikan tugas unit tugas pembinaan Pancasila. Tapi atas saran dari Megawati unit kerja diganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Megawati menunjukkan bahwa dia bisa menentukan sendiri

²² Antara, "Kader PDIP Diminta Amankan Dan Suskseskan Pencalonan Jokowi Pada Pilpres 2019," *Media Indonesia*, 2018.

²³ Metronews, "PDIP Usung Jokowi Secara Resmi Di Pilpres 2019" (Indonesia, 2018).

jabatan yang dia inginkan dalam pemerintahan Jokowi. Megawati mengatakan Jokowi kebangetan dengan jabatan sebagai unit pengarah yang dianggap merendahkan dirinya. Dan megawati menilai dirinya adalah mpoknya Jokowi atau ibunya Jokowi yang artinya harus patuh dengan perintah sang Mpok (ibu).

Jokowi akan merasakan beban politik ini selama kurang lebih lima tahun kedepan, dan Jokowi tidak lebih hanya petugas partai. Megawati memiliki dua kekuatan untuk menekan Jokowi, pertama Megawati adalah ketum parpol di mana Jokowi bernaung, dan kedua PDIP merupakan partai pendukung utama atas kemenangan Jokowi. Pengaruh Megawati ini juga tampak jelas dari pernyataan Jokowi yang mengaku bakal menyanggupi permintaan Megawati. Jokowi menjanjikan partai pemenang Pileg 2019 itu mendapat pos menteri yang lebih banyak.

Kesimpulan

Komunikasi politik yang dilakukan oleh Megawati dianggap adalah bentuk sindiran-sindiran baik secara langsung ditujukan kepada Jokowi maupun kepada para kadernya. Megawati ingin menunjukkan pesan-pesan politik yang tegas, yang dapat selalu diingat oleh para anggota partai, kader dan jajarannya, seperti menunjukkan eksistensi dirinya masih punya kapabilitas dalam memimpin partai dan mempengaruhi kepemimpinan Jokowi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang konstruksi media mengenai komunikasi politik Megawati Soekarnoputri terhadap kepemimpinan Jokowi dengan menggunakan analisis framing pada pemberitaan Metro TV. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberitaan-

pemberitaan tersebut menunjukkan bentuk sindiran-sindiran Megawati kepada Jokowi menyiratkan makna adanya kesan bahwa Jokowi tidak boleh melupakan sumbangsih besar Megawati sebagai ketua umum PDI-P dan sebagai orang berada dibalik keberhasilan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode ini.

Selain itu, gaya komunikasi politik yang diperlihatkan oleh Megawati yang disiarkan Metro TV pada pidato yang disampaikan dalam kongres V PDI-P maupun pada perayaan HUT ke-47 PDI-P dan pelaksanaan Rakornas I menimbulkan makna yang mendalam bahwa Megawati memiliki pengaruh besar terhadap kepemimpinan Jokowi. Bentuk pernyataan sikap dukungan yang diberikan oleh Megawati atas sebuah isu tertentu dan bagaimana Jokowi menyikapinya juga menyiratkan adanya pengaruh besar bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil Jokowi sudah sesuai dengan arahan atau kehendak ibu Megawati.

Sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Walikota Solo pada tahun 2005, memakai “kendaraan” PDIP dalam Pilkada saat itu hingga ia menang dan dilantik menjadi Walikota Solo. Bahkan dengan gaya politik “blusukan”, Jokowi berhasil terpilih kembali untuk periode kedua pada Pilkada Solo tahun 2010. Lalu Megawati Soekarnoputri memboyong Jokowi ke Jakarta karena keberhasilannya mengelola Kota Solo dengan pendekatan yang lebih humanis melalui “blusukan”. Hal tersebut tentunya menjadi hutang politik pak Jokowi kepada Megawati dan PDI Perjuangan yang telah berhasil membesarkan namanya dan menjadi orang nomor 1 di Indonesia selama dua periode. Bahkan anaknya, Gibran yang sekarang menjabat sebagai walikota

Solo tak lepas dari keputusan politik yang diputuskan oleh ketua umum PDI-P ibu Megawati Soekarnoputri. Dan berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan pengamatan terhadap pemberitaan Metro TV, Megawati merupakan sosok pemimpin partai yang sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan Jokowi.

Pusaka Acuan

- Antara. "Kader Pdp Diminta Amankan Dan Sukseskan Pencalonan Jokowi Pada Pilpres 2019." *Media Indonesia*, 2018.
- Budiman, Jofanny, And H.H. Daniel Tamburian. "Komunikasi Politik Megawati Dalam Membangun Brand Image Partai." *Koneksi* 2, No. 2 (2019): 401.
- Faisal. "Peran Joko Widodo Dalam Implementasi Nilai-nilai Pemikiran Maritim Soekarno Melalui Visi Poros Maritim Dunia." Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Halim, Syaiful. "Political Accountability And Television Media." *Ideology* 3 (2018).
- Harris, A. Zulkarnain Dan Syamsuddin. "Fenomena Blusukan Dalam Model Kepemimpinan Politik Joko Widodo." *Politik Dan Kajian Pembangunan* 13 (2017): Kajian Politik.
- Lathifah, Aliyah. *Media Televisi Sebagai Sumber Berita (Studi Terhadap Program Breaking News Metro Tv)*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar. Vol. 152, 2016.
- Metronews. "Pdp Usung Jokowi Secara Resmi Di Pilpres 2019." *Indonesia*, 2018.
- Metronewstv.Com. "Megawati: Menteri Dari Pdp Harus Lebih Banyak." *Indonesia: Metrotvnews.Com*, 2019.
- Muchtar, Khoiruddin. "Komunikasi Politik Dan Pembentukan Citra Partai." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, No. 2 (2016): 136-147.
- Mukarom, Zaenal. "Komunikasi_Politik." Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2016.
- News, Metro. "Menghidupkan Kembali Gbhn Adalah Ancaman Bagi Presiden," 2016.
- Perdana, Aditya Dan Ahmad Alhamid. "Presidentialized Party Di Indonesia: Kasus Perilaku Pdi-P Dalam Pencalonan Joko Widodo Pada Pilpres 2014." *Jurnal Politik* 3 (2018).
- Pureklolon, Dr. Thomas Tokan. *Komunikasi Politik, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus & Negarawan*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Putri, Clarisa Aisyah. "Politainment Media Di Indonesia." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya, 2018.
- Rusdin, Rusmawaty Bte. "Komunikasi Politik Jokowi Melalui Diplomasi Di Meja Makan." *Kinesik* 7 (2020).
- Yuliati, Yeni. "Analisis Framing Media Kompas Dalam Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017." *S2 Ilmu Politik Universitas Airlangga* (2017): 10.
- Yustiningsih, Rini. "Mata Najwa Metro Tv : Soal Jokowi Capres, Megawati: Bisa Enggak Kamu Jadi Pemimpin?" *Solopos.Com*. Solo: Solopos.Com, 2014.
- Zaman, Ali Noer. "Kehadiran Jokowi Di Pentas Politik Nasional." *Kajian Ilmu Sosial* 1 Nomor 1 (2020).

